

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Hukum dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Cet ke-3*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- MH Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki (I), 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus -TPK/2021/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

## **D. Jurnal**

Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, April 2014, Laely Wulandari, *“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)”*, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 1, No. 2.

I Gede Sayogaramasatya, I Made Minggu Widyantara, April 2021, Ida Ayu Putu Widiati, *“Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Korupsi Atas Penyalahgunaan Wewenang”*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1.

Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, Juni 2020, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Penelitian Hukum legalitas, Vol. 14, No. 2.

- Valecya Maya Yuwanta, Juli 2019, "*Pemidanaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4.
- Dwi Asri Mukaromah, 2013, "*Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx*", Vol. 1, No. 2.
- Elias Zadrack Leasa, Januari 2020, "*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*", Vol. 6, No. 1.
- Hasaziduhu Moho, 2019, "*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*", Vol. 1, No. 1.
- Ade Nomi, Dian Yusuf Ponco Saputro, M.Taufik D.S, Wahyu Rusdiantoro, Agustus 2021, "*Hal-hal yang Meringankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta atas Nama Dr. Pinangki Sirna Malasari SH.MH (Putusan Nomor: 10/Pid.TPK/2021/PT DKI)*", Vol. 1, No. 2.
- Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah, Januari 2021, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dana Desa*", Vol. 6, No. 1.
- Ivan Bohalima, September 2022, "*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*"i, Vol. 1, No. 2.
- Remencil, Januari 2019, "*Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*", Vol. 1, No. 2.
- Arianus Harefa, Februari 2022, "*Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", Vol. 8, No. 1.
- Fadhil M.Iskandar, Januari 2022, "*Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di indonesia*", Vol. 3, No.1.
- Purwadi Joko Santoso, April 2021, "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang* ", Vol. 02, No. 1.
- Didit Ferianto Pilok, Agustus 2013, "*Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam peradilan pidana menurut KUHAP*", Vol. II, Agustus 2013, No. 4.
- Marcus Priyo Gunarto, April 2009, "*Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*", Vol. 21, No.1.

Suharyo, November 2016, *“Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi”*, Vol. 16, No.1.

Tessalonika Novela Pangaila, Maret 2016, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”*, Vol. 4, No. 3.

Anri Manullang, Februari 2022, *“Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara”*, Vol. 3, No. 1.

